

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2014-2018

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) Sebagai  
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh  
SALSA ARUNNISA  
2017 / 17133084

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020

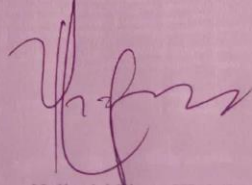
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2018

Nama : Salsa Arunnisa  
Nim : 17133084  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

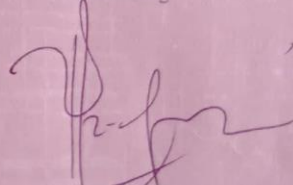
Padang, 20 November 2020

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi



Halkadri Pitra, SE, MM, Ak, CA  
NIP.198008092010121003

Disetujui Oleh,  
Pembimbing



Halkadri Pitra, SE, MM, Ak, CA  
NIP.198008092010121003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2018

Nama : Salsa Arunnisa  
Nim : 17133084  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 20 November 2020

Tim Penguji

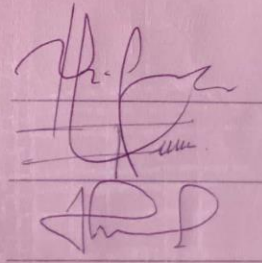
Nama

Tanda Tangan

1. Halkadri Fitra, SE, MM. Ak, CA (Ketua)

2. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak (Anggota)

3. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak (Anggota)



## SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsa Arunnisa  
Tahun Masuk/ NIM : 2017/ 17133084  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 20 Juni 1999  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komp. TVRI No. 11 Jati Adabiah Padang  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat Tahun 2014-2018

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2020

Yang Menyatakan

  
Salsa Arunnisa  
NIM. 17133084

## ABSTRAK

**Salsa Arunnisa : (17133084/2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat Tahun 2014-2018**

**Pembimbing : Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis derajat desentralisasi keuangan, kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, kontribusi retribusi terhadap total pendapatan asli daerah, efektifitas pendapaatn asli daerah, efisiensi belanja, varians belanja, pertumbuhan belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Pemerintah Kota di Sumatera Barat pada periode tahun 2014-2018.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptip kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pada setiap Pemerintah Kota di Sumatera Barat, dan data diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat berdasarkan 1) Derajat desentralisasi keuangan dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 11.62%. 2) Kemandirian keuangan dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 13.66%. 3) Ketergantungan Keuangan dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 87.20%.4) Efektifitas PAD dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 98.09%. 5) Kontribusi retribusi terhadap total PAD dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 12.20%. 6) Efisiensi belanja dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 85.47%. 7) Varians belanja dari tahun 2014-2018 selalu memiliki selisih yang menguntungkan. 8) Pertumbuhan belanja paling tinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015. 9) Rasio belanja modal terhadap total belanja dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 21.67%. 10) rasio belanja operasi terhadap total belanja dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 78.29%.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Derajat Desentralisasi Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Kontribusi Retribusi terhafap Total PAD, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah, Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul: “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat**”.Shalawat dan salamtak lupa pula penulis sampikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia yang tak henti-hentinya
2. Kepada kedua orang tua, Ibunda Risna Yulis, Ayahanda Dirhamson, dan abang-abang penulis serta keluarga besar yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moral maupun material kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris M.si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
5. Bapak Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing

Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.

6. Ibuk Vanica Serly, SE,M.SiCA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan
7. Bapak/Ibuk dosen serta Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
8. Terimakasih untuk Ulzana, Rini, Wila, Shela, Sintia, Ezi, Liza, Uswah, Siska, Gita, Risa, Suci, Pipin, Bulgis, Esa teman yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Semua teman -teman seperjuangan terkhusus Diploma III Akuntansi 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis

Atas segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas maka dengan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam tugas akhir ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Padang, 22 Oktober 2020

Salsa Arunnisa

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Laporan Keuangan Daerah.....	12
B. Keuangan Daerah .....	16
C. Kinerja Keuangan Daerah.....	22
D. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	24
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....	32
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Rancangan Penelitian.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum.....	36
1. Sejarah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat.....	36
B. Pembahasan.....	37
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
Lampiran .....	71
KAMPIRA .....	71
LAMPIRAN.....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Rasio Derajat Desentralisasi .....	25
Tabel 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	25
Tabel 3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	26
Tabel 4 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah .....	27
Tabel 5 Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	28
Tabel 6 Rasio Efisiensi Belanja .....	28
Tabel 7 Analisis Derajat Desentralisasi Keuangan .....	37
Tabel 8 Analisis Rasio Kemandirian .....	40
Tabel 9 Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	45
Tabel 10 Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah .....	48
Tabel 11 Analisis Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD .....	50
Tabel 12 Analisis Efisiensi Belanja .....	53
Tabel 13 Analisis Varians Belanja.....	55
Tabel 14 Analisis Pertumbuhan Belanja.....	58
Tabel 15 Analisis Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja .....	61
Tabel 16 Analisis Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi awal dimulainya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebelumnya telah di sempurnakan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menetapkan bahwa pemerintah daerah baik pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang

dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. (Supina Sino dkk, 2016)

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan.

Menurut Mahmudi (2010) laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja didalamnya. Laporan keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitasnya agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dan merugikan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang apa yang telah terjadi saja karena bersifat historis, sehingga timbul kesenjangan kebutuhan

informasi. Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut. Kesenjangan kebutuhan informasi dapat diatasi dengan cara mengolah kembali laporan keuangan, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan melakukan prediksi.

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Adanya APBD merupakan wujud perencanaan penganggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan

dilaksanakan (Halim, 2007:213). Rasio keuangan daerah akan memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan dan membiayai pemerintahannya. Dengan adanya rasio keuangan daerah dapat dilihat hubungan kemampuan keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah, karena wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat akan tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektifitas, rasio kontribusi, rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja, dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Keberhasilan suatu daerah tercermin dari penerimaan Pendapatan Daerah yang meningkat setiap tahunnya dan belanja yang tidak melebihi target setiap tahunnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232). Derajat desentralisasi melihat kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah, sehingga semakin besar persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan maka semakin baik, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halkadri, 2019). Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Halkadri, 2019). Rasio kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan atau proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi pendapatan retribusi daerah melihat berapa besaran sumbangan dari pendapatan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Abdul Halim, 2012). Rasio varians belanja merupakan analisis terhadap selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Jika realisasi belanja lebih kecil dari jumlah anggaran, maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka kinerja anggaran dikatakan kurang baik. (Saputra dkk, 2016).

Analisis pertumbuhan belanja berguna untuk mengetahui perubahan belanja dari tahun ke tahun, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. (Halkadri, 2019) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan target (anggaran) belanja. Rasio

efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi,2016). Rasio belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, melalui rasio ini akan dapat dilihat porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah perbandingan antara belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini melihatkan berapa persentase belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam satu periode terhadap total belanja (Halkadri, 2019).

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan juga penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas. Selain itu tujuan dari analisis kinerja keuangan daerah ini juga untuk mengetahui bagaimana tingkat rasio yang dianalisis, apakah mengalami penurunan atau peningkatan sesuai dengan kriteria penilaian masing masing rasio.

Dalam laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah, kita hanya dapat melihat keadaan atau kondisi keuangan suatu daerah tersebut dalam jumlah rupiahnya saja, namun belum mampu menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangannya, apakah rasio tersebut mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio efektifitas, rasio kontribusi retribusi terhadap total pendapatan asli daerah, rasio ketergantungan, rasio efisiensi belanja, rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio belanja operasi terhadap total belanja, apakah masuk ke dalam kategori tinggi, sedang, rendah atau rendah sekali. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014 sampai 2018 menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio kontribusi retribusi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efisiensi belanja, rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio belanja operasi terhadap total belanja. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Tahun 2014-2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD?
6. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio efisiensi belanja?
7. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio varians belanja?
8. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasiopertumbuhan belanja ?

9. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja?
10. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur dengan menggunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio derajat desentralisasi
2. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah
3. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan angan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan angan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan angan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

6. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan angan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio efisiensi belanja
7. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan angan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio varians belanja
8. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan angan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio pertumbuhan belanja
9. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja.
10. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat tahun tahun 2014-2018 diukur menggunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini.

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk menemukan bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota di Sumatera Barat, sehingga diharapkan masing-masing Pemerintah Kota mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerahnya dan mampu menggunkan anggran belanja seminimun mungkin. Penelitian ini juga sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, mandiri, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

## 3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

## 4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab iv di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur berdasarkan rasio derajat desentralisasi dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah 11.62% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kota di Sumatera Barat masih kurang dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya dan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan eksternal.
2. Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera diukur berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah 13.66% dan dikategorikan mempunyai kemampuan keuangan yang rendah sekali, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
3. Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah sebesar 87.20%, yang artinya Pemerintah Kota di Sumatera Barat masih sangat bergantung kepada pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi.
4. Kinerja keuangan pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur menggunakan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya

adalah sebesar 98.09%, yang artinya kinerja Pemerintah Kota di Sumatera Barat dalam mencapai target (anggran) pendapatan asli daerah sudah efektif.

5. Kinerja keuangan pemerintah kota di Sumatera Barat diukur menggunakan rasio kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah sebesar 12.20%, yang artinya dari 100% pendapatan asli daerah hanya 12.20% saja pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah.
6. Kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur menggunakan rasio efisiensi belanja dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah sebesar 85.47%, yang artinya kinerja belanja daerah Pemerintah Kota di Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 sudah cukup efisien dan telah berhasil menghemat belanja daerahnya.
7. Kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur dengan menggunakan varians belanja daerah dari tahun 2014-2018 dapat dikatakan sudah baik. Karna memiliki selisih negatif atau selisih yang menguntungkan.
8. Kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan belanja dari tahun 2014-2018 berfluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan belanja paling tinggi terjadi pada Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 20.73% , dan pertumbuhan belanja paling rendah dan bernilai negatif terjadi pada Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2016 ke tahun 2017 dengan rasio pertumbuhan sebesar -6.43%

9. Kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat diukur dengan menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah sebesar 21.67%, yang artinya dari 100% total belanja daerah, 21.67% nya untuk belanja modal.
10. Kinerja keuangan pemerintah kota di Sumatera Barat diukur dengan menggunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja dari tahun 2014-2018 dilihat dari rata-ratanya adalah sebesar 78.29%, yang artinya dari 100% belanja daerah, 78.29% nya untuk belanja operasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kota di Sumatera Barat agar mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparaturnya daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kota di Sumatera Barat juga harus memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang diterima, juga sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2020. Situs Resmi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat <https://dpkd.sumbarprov.go.id/>
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Fitra, Halkadri. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Fe UNP.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif. Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mikha, Danied. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Kajian akuntansi, Vol. 5, (1907-1442)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Saputra, I, Fridayana. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.